1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Saat ini sejumlah kebutuhan pokok di Kab. Kep.Meranti mengalami fluktuasi yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kab. Kep. Meranti (sumber: Disperindag Kab. Kep. Meranti). Adapun komiditi yang mengalami fluktuasi di triwulan III adalah:

   1. Bawang merah pada bulan Juli harga rata-rata 1kg Rp.39.304,00, bulan Agustus Rp. 36.000,00/kg, bulan September Rp.36.000,00/kg
   2. Bawang putih pada bulan Juli Rp.36.000,00/kg, bulan Agustus Rp.36.000,00/kg, bulan September Rp.36.000,00/kg
   3. Daging ayam ras pada bulan Juli Rp.31.248,00/kg, bulan Agustus Rp.37.376,00/kg, bulan September Rp.37.695,00/kg
   4. Telur ayam ras bulan Juli Rp.26.243,00.kg, bulan Agustus Rp.26.867,00/kg, bulan September Rp.27.018,00/kg
   5. Gula pasir kemasan bulan Juli Rp.19.500,00/kg, bulan Agustus Rp.19.500,00/kg, bulan September Rp.19.500,00/kg
   6. Minyak goreng kemasan bulan Juli Rp.25.000,00/kg, bulan Agustus Rp. 25.000,00/kg, bulan September 25.000,00/kg
   7. Tepung terigu bulan Juli Rp.12,000,00/kg, bulan Agustus Rp. 12,000,00/kg, bulan September Rp. 12,000,00/kg

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Kenaikan sejumlah bahan pokok di Kepulauan Meranti disebabkan karena terkendalanya aksesbilitas antara Kab. Kep.Meranti dari dan ke pulau Sumatera. Hal ini membuat biaya transportasi menjadi tinggi yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Selain itu, biaya transportasi melalui laut, darat dan udara juga meningkat. Serta sejak diberlakukannya pelarangan perdagangan lintas batas di Meranti menyebabkan harga sejumlah bahan pokok seperti sayur mayur, cabe, bawang, gula, dan bahan kebutuhan lainnya mengalami kenaikan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Permohonan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menfasilitasi dibukanya kembali jalur perdagangan lintas batas di Kab. Kepulauan Meranti.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Sampai saat ini perdagangan lintas batas belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Perdagangan lintas batas dapat dibuka kembali untuk menghubungkan Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga untuk dapat segeramensupplay barang-barang kebutuhan dari Propinsi Riau

Kepulauan yaitu daerah Tj. Balai Karimun, Batam, atau negara tetangga yang jaraknya relatif lebih dekat jika dibandingkan disupplay dari Riau Kepulauan terutama daerah Pekanbaru, Dumai, Sumbar, Medan, dan Jakarta. Sampai saat ini Kab. Kep. Meranti belum mendapatkan fasilitas dari zona perdagangan bebas (Free Trade Zone).